



Dukung Renovasi Kantor Gubernur

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menilai langkah pembangunan renovasi Kantor Gubernur Kalbar memang harus dilakukan. Berdasarkan pengamatannya, jika kantor Gubernur Kalbar sudah cukup tua dan kapasitasnya sudah sangat sempit.

"Kita sering kali studi banding di beberapa provinsi memang kondisi kantor Gubernur kita sudah kurang agak layak untuk kenyamanan dan kelancaran pelayanan sehingga kami pada periode lalu sudah menyetujui untuk renovasi dan membangun kembali kantor Gubernur yang baru," katanya, Kamis (6/2).

S o a l



TRIBUN FILE
Suriansyah

pembangunan kantor Gubernur itu. Ketua DPD Gerindra Kalbar ini mengatakan jika tentu masing-masing punya penafsiran.

"Adapun tanggapan dari beberapa teman yang belum sependapat tentu mereka juga punya alasan, mereka karena dipundaknya terbebani kondisi infrastruktur yang kurang baik didaerah-daerah dapilnya tentu inginnya supaya infrastruktur terutama jalan menjadi perhatian pemerintah," tuturnya.

Dengan keterbatasan ini, lanjut Suriansyah, memang harus ada pilihan dan harus ada yang menjadi prioritas.

"Jadi saya rasa tidak salah juga (kritikan, red), tapi Gubernur juga tidak salah, beliaukan visinya antara lain peningkatan pelayanan birokrasi yang baik," ujarnya.

Terlebih, ia meyakini dengan pembangunan Kantor Gubernur Kalbar yang baru akan menambah wibawa pemerintahan Kalbar.

"Ya saya rasa pembangunan Kantor Gubernur perlu juga karena menunjukan citra dari Kalbar, kalau kantor Gubernur-



Kita sering kali studi banding di beberapa provinsi memang kondisi kantor Gubernur kita sudah kurang agak layak untuk kenyamanan dan kelancaran pelayanan

Suriansyah
Wakil Ketua DPRD Kalbar

nurnya baik kan wibawa pemerintahan kita juga baik," pungkasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalbar, Michael Yan Sri Widodo mendukung penuh pembangunan kantor Gubernur Kalbar yang baru.

Terlebih, ia yang juga anggota DPRD periode lalu menyetujui pengajuan yang dilakukan pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur.

"Kita harus tau bahwa kantor Gubernur itu ibaratnya rumah dari pemerintahan provinsi. Kita boleh mengatakan, kita punya kepentingan infrastruktur, sarana dan prasarana yang lain, tapi setiap kunjungan,

ada tamu negara, tamu kementerian semua pasti mampirnya ke kantor Gubernur," katanya.

Terlebih, lanjut Michael Yan, aktivitas pemerintahan semakin tinggi. Selain itu juga ditambah dengan jumlah pegawai yang bertambah dan kewenangan yang kini banyak dilimpahkan ke Pemprov.

"Kenyamanan lingkungan kerja harus didukung kondisi yang baik," ujarnya.

"Jadi kalau ada pembangunan kantor Gubernur itu sangat baik, bagaimana kita mau mengukur indikasi kemajuan dari suatu daerah kalau kantornya sudah tidak layak," tambah Michael.

Soal anggaran dana yang terbatas, DPRD disebutnya tentu maklum, terlebih semua membutuhkan sentuhan anggaran, namun barang tentu eksekutif dan legislatif menentukan mana yang lebih diprioritaskan.

"Selama ini kita tau bahwa yang menyusun APBD, yang membuat RKPD dari eksekutif, bahwa DPRD membahas dan memberi persetujuan selama tidak bertentangan dengan UU dan prioritas RKPD dan Musrembang yang ada tentu kita sangat mendukung," katanya.

"Jangan sampai juga kita terlalu apriori sehingga semua rencana yang disusun eksekutif tidak baik dan kemudian harus kita ganti," tutup politisi NasDem ini. **(dho)**